



UNIVERSITAS ANDALAS
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
DEPARTEMEN AKUNTANSI

SKRIPSI

**ANALISIS AUDIT PENGHITUNGAN KERUGIAN NEGARA PADA KASUS
PERKARA DUGAAN TINDAK PIDANA KORUPSI TERHADAP PENGELOLAAN
DANA PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH
KEMAKMURAN MENTAWAI TAHUN 2017 S.D 2019**

Disusun Oleh

Abdillah Arrazi
2110532066

Pembimbing

Dr. Hamdani, MM, M.Si., Ak., CA

**Diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat – syarat guna memperoleh gelar
Sarjana Akuntansi**

PADANG

2026

	No. Alumni Universitas	Abdillah Arrazi	No. Alumni Fakultas
	BIODATA a) Tempat/Tanggal Lahir: Jakarta/ 5 Maret 2002 b) Nama Orang Tua: Asri Ardansyah dan Devi Ramadian c) Fakultas: Ekonomi dan Bisnis d) Departemen: Akuntansi e) No. BP: 2110532066 f) Tanggal Lulus: 03 Agustus 2026 g) Predikat Lulus: Dengan Pujian h) IPK: 3.58 i) Lama Studi: 5 Tahun j) Alamat Orang Tua: Jalan Jorong Minang, Kecamatan Lima Kaum, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat		
ANALISIS AUDIT PENGHITUNGAN KERUGIAN NEGARA PADA KASUS PERKARA DUGAAN TINDAK PIDANA KORUPSI TERHADAP PENGELOLAAN DANA PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH KEMAKMURAN MENTAWAI TAHUN 2017 S.D 2019 Skripsi oleh: Abdillah Arrazi Dosen Pembimbing: Dr. Hamdani, MM, M.Si., Ak., CA ABSTRACT <i>This study aims to evaluate the process and results of the state financial loss calculation (PKKN) audit in the alleged corruption case involving the management of government capital participation funds at the Kemakmuran Mentawai Regional Public Company for the period 2017 to 2019. This study employs a qualitative approach with a case study design. Research data were obtained from secondary sources comprising the PKKN audit report, court verdict, indictment, expert testimony document, and relevant legislation. Data were collected through library research and documentation methods. Data analysis was conducted using a descriptive-qualitative technique referring to BPK Regulation Number 1 of 2020, BPK Implementation Guidelines Book 2, and the Indonesian Government Internal Audit Standards (SAIPI). The findings indicate that the audit process conducted by the West Sumatra High Prosecutor's Office did not conform to the applicable investigative audit standards. This relates to the absence of normative authority for the Prosecutor's Office to conduct PKKN audits as affirmed by Article 14 of BPK Regulation Number 1 of 2020 and Constitutional Court Decision Number 28/PUU-XXIV/2026, failure to meet the independence principle due to the duality of roles as both auditor and prosecutor within the same institution, failure to maintain objectivity through the unsubstantiated disregard of an Unqualified Opinion issued by an independent public accounting firm, and the non-application of the reverse proof axiom as required by BPK</i>			

Implementation Guidelines Book 2. The results of the PKKN audit conducted by the West Sumatra High Prosecutor's Office were inaccurate and did not fulfill the criteria of actual and definite state financial loss as required by Constitutional Court Decision Number 25/PUU-XIV/2016 and Article 1 point 22 of Law Number 1 of 2004, as the global calculation method employed was incapable of distinguishing losses from unlawful acts from legitimate operational expenditures, and lacked demonstrable causality between the stated loss amount and the acts that enriched the defendants.

Keywords: *Investigative Audit, State Financial Loss Calculation, Corruption, Regional Public Company, Actual Loss, Stewardship Theory, Auditor Independence*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi proses dan hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara (PKKN) dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi terhadap pengelolaan dana penyertaan modal pada Perusahaan Umum Daerah Kemakmuran Mentawai tahun 2017 sampai dengan 2019. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus. Data penelitian diperoleh dari data sekunder berupa laporan hasil audit PKKN, putusan hakim, surat dakwaan, naskah keterangan ahli, serta peraturan perundang-undangan yang relevan. Teknik pengumpulan data menggunakan metode studi pustaka dan metode dokumentasi. Analisis data dilakukan secara deskriptif-kualitatif dengan mengacu pada Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2020, Petunjuk Pelaksanaan Penghitungan Kerugian Negara Buku 2 BPK, dan Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia (SAIPI). Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses audit yang dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat tidak sesuai dengan standar audit investigatif yang berlaku. Hal tersebut terkait dengan tidak adanya kewenangan normatif Kejaksaan untuk melaksanakan audit PKKN sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 14 Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2020 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XXIV/2026, tidak terpenuhinya prinsip independensi akibat dualisme peran auditor sekaligus penuntut dalam institusi yang sama, tidak terpenuhinya objektivitas karena pengabaian opini Wajar Tanpa Pengecualian dari Kantor Akuntan Publik tanpa justifikasi metodologis, serta tidak diterapkannya aksioma pembuktian dua sisi sebagaimana diwajibkan Juklak Buku 2 BPK. Hasil audit PKKN yang dilaksanakan Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat tidak tepat dan tidak memenuhi kriteria kerugian keuangan negara yang nyata dan pasti jumlahnya sebagaimana dipersyaratkan dalam Putusan MK Nomor 25/PUU-XIV/2016 dan Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, karena menggunakan metode perhitungan global yang tidak dapat memilah kerugian akibat perbuatan melawan hukum dari kerugian usaha yang sah, serta tidak memiliki kausalitas yang dapat dibuktikan antara nilai kerugian dengan perbuatan yang memperkaya terdakwa.

Kata Kunci: Audit Investigatif, Penghitungan Kerugian Keuangan Negara, Tindak Pidana Korupsi, Perumda, Actual Loss, Stewardship Theory, Independensi Auditor